

Policy Assessment 2022

Proses Pembelajaran Siswa Sekolah Dasar dan Menengah di Tahun Ketiga Pandemi dan Implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19



Nisaaul Muthiah

nisaaul@theindonesianinstitute.com

Peneliti Bidang Sosial

Policy Assessment 2022

Ringkasan Eksekutif

Kondisi Covid-19 di awal hingga pertengahan tahun ketiga pandemi yang masih belum menentu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada proses pembelajaran yang dijalani oleh para siswa dan guru. Berbagai pelaku pendidikan dituntut untuk dapat bersikap fleksibel dalam menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi Covid-19 yang berkembang di masyarakat. Pemerintah juga terus melakukan penyesuaian SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Covid-19. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kendala dalam proses PTM dan PJJ yang masih dihadapi oleh siswa dan guru sekolah dasar dan menengah di Indonesia, serta melihat implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara bersama beberapa siswa dan guru yang ada di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Magelang dan Sragen. Selain wawancara, data sekunder yang berasal dari jurnal, *website* pemerintah, media massa, dan sumber lainnya juga dikumpulkan untuk memperkuat temuan saat wawancara dan memperkaya data mengenai PTM dan PJJ di beberapa daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa dan guru di beberapa daerah di Indonesia masih lebih memilih untuk melakukan PTM dibanding PJJ karena berbagai hal. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aturan yang tertuang dalam SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Covid-19 belum diimplementasikan dengan baik. Adanya berbagai kendala menyebabkan tidak maksimalnya pengimplementasian aturan tersebut. Sejumlah rekomendasi juga diberikan kepada berbagai pemangku kepentingan terkait untuk memperbaiki implementasi proses pembelajaran di masa pandemi dan di masa yang akan datang.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	I
Daftar Isi	II
Daftar Singkatan	III
Pendahuluan	1
Pertanyaan Penelitian	3
Metode Penelitian	3
Tinjauan Pustaka	5
<i>Distance Education (Pembelajaran Jarak Jauh)</i>	5
Keuntungan dan Kerugian dari Pembelajaran Jarak Jauh.....	5
Implementasi Kebijakan.....	6
Hasil dan Pembahasan	8
Proses Pembelajaran di Awal hingga Pertengahan Tahun Ketiga Pandemi Covid-19.....	8
Implementasi SKB 4 Menteri.....	12
Penutup dan Rekomendasi	15
Penutup.....	15
Rekomendasi.....	16
Daftar Pustaka	18
Profil Penulis	21
Profil Lembaga	22

Daftar Singkatan

Covid-19	= <i>Coronavirus Disease 2019</i>
Inmendagri	= Instruksi Menteri Dalam Negeri
IPA	= Ilmu Pengetahuan Alam
IPS	= Ilmu Pengetahuan Sosial
Kemendikbudristek	= Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
LPTK	= Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
MAN	= Madrasah Aliyah Negeri
P2G	= Perhimpunan Pendidikan dan Guru
PJJ	= Pembelajaran Jarak Jauh
PPG	= Pendidikan Profesi Guru
PPKM	= Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PTM	= Pembelajaran Tatap Muka
RUU Sisdiknas	= Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
SD	= Sekolah Dasar
SE	= Surat Edaran
SKB	= Surat Keputusan Bersama
SMA	= Sekolah Menengah Atas
SMK	= Sekolah Menengah Kejuruan
UNICEF	= United Nations International Children's Emergency Fund

Pendahuluan

Pada awal bulan Januari 2022, berbagai daerah di Indonesia telah menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Tidak sedikit dari daerah-daerah tersebut yang menerapkan PTM terbatas 100 persen. Di waktu yang bersamaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sempat memastikan bahwa Indonesia telah siap menggelar PTM terbatas kala itu. Pasalnya, saat itu tidak ada wilayah yang memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 (inews.id, 03/01/2022). Kepastian dari Kemendikbudristek tersebut kemudian menjadi salah satu dasar pelaksanaan PTM terbatas di awal bulan Januari 2022.

Langkah daerah untuk memulai PTM terbatas juga didasari oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Pada penyesuaian kelima SKB tersebut tertulis bahwa satuan pendidikan yang berada di level PPKM 1 atau 2, dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan di atas 80%, dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di atas 50%, maka PTM dilaksanakan setiap hari dengan jumlah peserta didik 100 persen dari kapasitas ruang kelas dan waktu belajar paling lama enam jam pelajaran setiap harinya.

Pada pertengahan bulan Januari 2022, 68 persen atau 276.032 satuan pendidikan telah menerapkan PTM 100 persen dengan durasi maksimal pembelajaran enam jam. Selain itu, 21 persen atau sekitar 96 ribu satuan pendidikan menerapkan PTM 50 persen dengan durasi belajar maksimal enam jam pelajaran, 10 persen satuan pendidikan menerapkan PTM 50 persen dengan durasi belajar maksimal empat jam. Sisanya, 1 persen menggelar pembelajaran jarak jauh (PJJ) penuh (Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek dalam tempo.co, 20/01/2022).

Namun, di pekan pertama bulan Februari 2022, beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta, mulai menyetop PTM terbatas dan kembali pada PJJ. Pasalnya, di pertengahan bulan Januari hingga akhir Februari 2022, jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan, yakni dari 454 kasus baru pada 10 Januari 2022, kemudian mengalami peningkatan kembali, hingga pada 16 Februari 2022 total kasus baru mencapai 64.718 kasus.

Peningkatan kasus baru tersebut juga disertai dengan pengeluaran Surat Edaran (SE) Mendikbud-Ristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. SE tersebut salah satunya mengatur soal bolehnya daerah dengan pemberlakuan PPKM level 2 untuk mengimplementasikan PTM terbatas 50 persen. SE tersebut juga menegaskan beberapa hal yang tertulis dalam SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 mengenai penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam proses PTM terbatas. Dalam SE tersebut, orang tua/wali murid juga diberi hak kembali untuk menentukan apakah anak mereka akan mengikuti PTM terbatas atau PJJ.

Hingga pertengahan bulan Juni 2022, SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 telah mengalami penyesuaian sebanyak enam kali. Beberapa perbedaan antara penyesuaian keenam dengan kelima misalnya di penyesuaian keenam, satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 1, 2, dan 3 dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di atas 60 persen di tingkat kabupaten/kota, maka PTM dilaksanakan setiap hari dengan jumlah peserta didik 100 persen dari kapasitas ruang kelas, dan jam pelajaran sesuai dengan kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan.

Selain perbedaan jam pelajaran, dalam penyesuaian keenam ini pemerintah juga telah memperbolehkan pembukaan kantin, serta pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga. Kantin dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 75 persen untuk PPKM level 1, 2, dan 3, serta 50 persen bagi satuan pendidikan do PPKM level 4. Pengelolaan kantin dilaksanakan sesuai dengan kriteria kantin sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat.

Jika melihat implementasi PTM terbatas sebelumnya, di akhir bulan Januari 2022, PTM terbatas justru menjadi salah satu klaster penularan Covid-19 (megapolitan.kompas.com, 26/01/2022). Salah satu penyebabnya adalah lengahnya penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan. Menurut Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriawan Salim, pelanggaran protokol kesehatan tersebut, misalnya, tidak diterapkannya jarak satu meter di ruang kelas, adanya kerumunan siswa baik itu di kantin maupun di ruangan, serta tidak terbukanya sirkulasi udara di ruang kelas.

Lengahnya penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan dalam proses PTM terbatas menunjukkan bahwa SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 belum diimplementasikan dengan maksimal. Hal ini menyebabkan satuan

pendidikan menjadi salah satu klaster penyebaran virus Covid-19. Padahal, studi menunjukkan bahwa pembelajaran tatap muka masih lebih efektif dibanding pembelajaran jarak jauh (Kemendikbudristek dalam Ramadhan, 2021). Sementara, di awal tahun 2022 ini, masih ada siswa yang mengalami kendala dalam proses PJJ.

Kabar terbaru dari berbagai media, di awal bulan April 2022, berbagai daerah di Indonesia kembali memberlakukan PTM 100 persen terbatas dan 50 persen terbatas. Daerah-daerah tersebut diantaranya adalah Jawa Tengah, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Jakarta, Yogyakarta, Bali, dan lain-lain.

Untuk itu, penelitian ini ditujukan untuk melihat proses pembelajaran yang ada di beberapa daerah di Indonesia saat ini, termasuk pada kendala yang masih dihadapi siswa dan guru, baik itu dalam PJJ maupun PTM terbatas. Penelitian ini juga ditujukan untuk melihat implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan temuan dan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi pengembangan proses belajar anak di Indonesia.

Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja kendala dalam proses pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh yang masih dihadapi oleh siswa dan guru sekolah dasar dan menengah di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19?
3. Apa saja rekomendasi kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan proses pembelajaran di tahun ketiga pandemi?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Snape dan Spencer (2003), metode kualitatif adalah metode yang memiliki beberapa karakteristik diantaranya:

- Ditujukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan ditafsirkan dengan memahami dunia sosial dari partisipan/ informan penelitian, seperti kondisi sosial ekonomi, pengalaman, perspektif, dan sejarah dari informan.
- Jumlah informan berskala kecil dan dipilih dengan sengaja berdasar kriteria yang menonjol.

- Dalam proses pengumpulan data melibatkan kontak dekat antara peneliti dan peserta penelitian. Penggalian informasi dilakukan secara interaktif dan memungkinkan munculnya eksplorasi isu-isu yang muncul.
- Data sangat rinci, kaya, dan luas.
- Proses analisis terbuka untuk konsep dan ide yang muncul, sehingga dapat dihasilkan deskripsi dan klasifikasi yang rinci.
- Output dari penelitian cenderung berfokus pada interpretasi makna sosial, baik melalui pemetaan atau representasi dunia sosial dari informan.

Berdasar katakteristik di atas, penelitian ini salah satunya mengumpulkan data dengan melakukan wawancara. Informan penelitian adalah siswa dan guru yang menjalani PTM atau PJJ di Jawa Tengah. Daerah tersebut dipilih karena pada tahun 2021, Jawa Tengah mendapatkan apresiasi dari United Nations Internasional Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam pelaksanaan PTM, terutama dalam hal memperhatikan keamanan dan kesehatan siswa, guru, maupun orang tua. Selain itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga pernah memiliki rencana untuk mengembangkan platform untuk memantau kesiapan dan keamanan sekolah untuk menyelenggarakan PTM (jatengprov.go.id, 29/09/2021). Lebih jauh, sebagai bahan tambahan contoh praktik di lapangan, penelitian ini juga mengambil informasi dari narasumber/informan di Kabupaten Magelang dan Sragen untuk dianalisis. Kedua daerah tersebut dipilih karena dari awal hingga pertengahan tahun ketiga pandemi ini, kedua daerah tersebut pernah menerapkan PJJ dan PTM. Kemudahan akses peneliti kepada informan di daerah tersebut juga menjadi alasan lain untuk mengatasi adanya berbagai kendala sumber daya dalam proses penelitian. Hasil wawancara akan diinterpretasikan dengan melihat latar belakang sosial dari informan.

Selain wawancara, penelitian ini juga akan menggunakan data sekunder sebagai sumber analisis data. Data sekunder didapatkan dari jurnal, *website* pemerintah, media, dan lain-lain. Data sekunder yang dicari dalam penelitian ini bukan hanya data mengenai proses PTM dan PJJ di Jawa Tengah saja, namun juga di daerah-daerah lain di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Distance Education (Pembelajaran Jarak Jauh)

Pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu model baru yang muncul karena adanya permintaan pasar. Pembelajaran jarak jauh diharapkan menjadi sarana untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih gesit. Menurut Nunes (dalam Costa et al., 2020), pembelajaran jarak jauh dapat didefinisikan sebagai seperangkat upaya yang dapat membantu siswa dalam jumlah yang banyak, terlepas dari lokasi geografis mereka, dengan kualitas tinggi, karena tidak membahayakan konten atau metode pendampingan.

Moore dan Kearsley (2011) mendefinisikan pembelajaran jarak jauh sebagai metodologi pengajaran dan pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi, dalam prosesnya agen terlibat secara terpisah baik itu secara temporal maupun tidak.

Belloni (1999) menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh erat kaitannya dengan produksi dan kualifikasi. Lembaga yang menerapkan pembelajaran jarak jauh perlu berinvestasi lebih pada platform pembelajaran virtual. Menurut Belloni, pembelajaran jarak jauh akan membawa pada fleksibilitas, kepraktisan, dan pemangkasan biaya pendidikan jika dibandingkan dengan proses pendidikan yang dilakukan di dalam kelas.

Barros (dalam Costa et al., 2020) berargumen bahwa pembelajaran jarak jauh selain merupakan proses belajar yang dimediasi oleh teknologi, juga memiliki karakteristik lain seperti adanya perbedaan waktu dan ruang dari agen, sehingga dibutuhkan kebiasaan untuk belajar mandiri. Dengan demikian, pembelajaran jarak jauh menjadi metode pengajaran yang memungkinkan terwujudnya pendidikan yang berkualitas dengan mengatasi permasalahan ruang dan waktu dan memanfaatkan teknologi baru yang terus muncul.

Keuntungan dan Kerugian dari Pembelajaran Jarak Jauh

Kokemuller (n.d.) dalam artikel yang ia tulis menyatakan bahwa *online education*/ pendidikan *online*/pembelajaran jarak jauh memiliki banyak manfaat bagi orang dewasa yang telah bekerja. Dengan adanya pendidikan *online*, orang yang telah bekerja memiliki kesempatan untuk mengambil kelas dan menyelesaikan perkuliahan mereka. Sebuah studi yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2011 menunjukkan bahwa 77 persen rektor perguruan tinggi melaporkan bahwa lembaga mereka menawarkan kelas *online*.

Permintaan para mahasiswa dan keuntungan perguruan tinggi dalam menawarkan kelas *online* telah berkontribusi pada pertumbuhan internet. Namun, terlepas dari kelebihanannya, mahasiswa yang tidak terbiasa/ tidak memiliki keterampilan dalam belajar *online* harus lebih berjuang untuk menggunakan berbagai platform belajar *online*. Apalagi beberapa platform belajar *online* juga masih memiliki keterbatasan.

Menurut Kokemuller, dalam membandingkan pilihan antara belajar daring atau belajar di ruang kelas/ pembelajaran tatap muka, mahasiswa/ siswa perlu mengenali gaya dan kebutuhan belajar mereka sendiri. Siswa yang memiliki hambatan dengan teknologi akan membutuhkan interaksi yang teratur dengan profesor dan teman-teman mereka. Selain itu, siswa yang merasa memiliki disiplin diri dan akuntabilitas yang kurang akan memerlukan struktur pembelajaran yang lebih tradisional (pembelajaran tatap muka). Sementara, orang dewasa yang bekerja dan membutuhkan fleksibilitas, memiliki keterampilan teknologi yang kuat, lebih suka belajar dari rumah, memiliki disiplin diri untuk mengatur jadwal/ agenda antara belajar dan bekerja akan cocok dengan sistem *online education*.

Terlepas dari berbagai keunggulannya, *online education* memiliki kelemahan seperti kurangnya kontak secara langsung. Hal tersebut berdampak negatif pada kemampuan siswa untuk berinteraksi baik itu dengan guru maupun rekan sebaya. Tidak adanya kontak langsung juga dapat menghilangkan beberapa aspek sosial seperti interaksi sosial yang terjadi secara informal di satuan pendidikan.

Efek negatif lain dari kelas *online* adalah risiko putus sekolah yang lebih tinggi. Sebuah studi yang dipublikasikan pada bulan Juli 2011 oleh Columbia University Community College Research Center, menunjukkan bahwa mahasiswa perguruan tinggi Washington lebih mungkin untuk meninggalkan kelas *online* daripada kelas tradisional. Tingkat penyelesaian kelas tradisional adalah 90 persen, sementara kelas *online* adalah 82 persen. Selain itu, siswa dalam studi yang mengambil kelas *online* cenderung tidak menyelesaikan kelas mereka atau pindah ke perguruan tinggi lain.

Implementasi Kebijakan

Menurut Wibawa (1994), implementasi kebijakan merupakan bentuk pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar. Kebijakan tersebut biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, instruksi, atau keputusan perundang-undangan. Sementara menurut

Wahab (2008), implementasi kebijakan adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau sektor privat yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

Winarno (2008) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Lebih lanjut, Mufiz (1999) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Implementasi kebijakan harus menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri.

Yuliah (2020) menyatakan bahwa implementasi merupakan faktor terpenting dari sebuah kebijakan, termasuk dalam kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan merupakan proses yang bersangkutan paut dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran. Proses implementasi bersangkutan paut pula dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat terealisasikan.

Van Meter dan Van Horn (1975) mengembangkan model proses implementasi kebijakan. Dalam model tersebut, terdapat enam variabel yang dapat meningkatkan kejelasan antara kebijakan dan kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan; komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktivitas; karakteristik organisasi komunikasi antar organisasi; kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta sikap atau karakter pelaksana.

Selain beberapa variabel di atas, terdapat pula beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan yang didefinisikan oleh Peter (dalam Tangkilisan, 2003). Beberapa faktor tersebut diantaranya:

- Kurangnya informasi yang dapat berakibat pada gambaran-gambaran yang kurang tepat mengenai isi kebijakan yang sesungguhnya. Gambaran yang kurang jelas tersebut berdampak buruk kepada objek kebijakan maupun kepada pelaksana dari isi kebijakan. Kurangnya informasi juga dapat menyebabkan adanya kesalahpahaman dan perbedaan persepsi antara pelaksana kebijakan.

- Isi kebijakan yang samar-samar dan tidak jelas atau tidak tegas. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi maupun tujuan kebijakan.
- Tidak cukupnya dukungan dalam melaksanakan kebijakan. Implementasi kebijakan akan sangat sulit apabila pada pelaksanaannya tidak mendapat cukup dukungan, termasuk dukungan sumber daya.
- Pembagian potensi yang bersifat diferensiasi tugas dan wewenang para aktor implementasi kebijakan.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penelitian ini menganalisis proses pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di awal hingga pertengahan tahun ketiga pandemi, serta implementasi dari SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Temuan dari hasil wawancara dan studi literatur dalam penelitian ini dianalisis dengan merujuk pada konsep yang telah dijabarkan di atas.

Hasil dan Pembahasan

Proses Pembelajaran di Awal hingga Pertengahan Tahun Ketiga Pandemi Covid-19

Keputusan bagi satuan pendidikan untuk melakukan PTM atau PJJ sangat berkaitan dengan perkembangan kondisi Covid-19 di wilayah tempat satuan pendidikan berada. Dalam kurun waktu lima bulan terakhir, beragam langkah dan penyesuaian kebijakan dilakukan oleh satuan pendidikan dan pemerintah di berbagai daerah untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan situasi Covid-19.

Di awal bulan Januari 2022, 68 persen atau 276.032 satuan pendidikan telah menerapkan PTM 100 persen dengan durasi maksimal pembelajaran enam jam (Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek dalam tempo.co, 20/01/2022). Selanjutnya, di akhir bulan Januari hingga Februari 2022, PTM terbatas sempat menjadi salah satu kluster penyebaran Covid-19 di beberapa satuan pendidikan seperti di DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan beberapa daerah lain (detik.com, 20/02/2022; republika.co.id, 03/02/2022), oleh sebab itu PTM terbatas sempat dihentikan di beberapa daerah dan digantikan dengan PJJ.

Kini di pertengahan bulan Juni 2022, kebanyakan satuan pendidikan di Indonesia sudah menerapkan PTM secara penuh. Menurut Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti (Kemendikbud RI, 14/06/2022), saat ini terdapat 94 persen sekolah yang menjalankan PTM

penyakit. Terdapat satu kabupaten di Papua yang belum mengikuti PTM 100 persen karena masih berada di PPKM level 2.

Banyaknya satuan pendidikan yang sudah melakukan sesuai dengan kondisi kondisi Covid-19 di Indonesia yang kian membaik. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 29 dan 30 tentang PPKM yang berlaku mulai tanggal 7 Juni hingga 4 Juli 2022, menunjukkan bahwa hampir semua daerah di Indonesia telah berada di PPKM level 1. Hanya satu kabupaten yang berstatus PPKM level 2, yakni Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat. Walaupun begitu, per 14 Juni 2022, jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia kembali meningkat, yakni menjadi 5.298 kasus aktif (Covid19.go.id, 14/06/2022). Peningkatan kasus tersebut termasuk yang paling tinggi sejak bulan April 2022.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa siswa, guru, dan pemangku kepentingan di dunia pendidikan lainnya hingga saat ini harus berdamai dengan kondisi yang sangat tidak pasti akibat pandemi. Kita tahu bahwa proses pembelajaran di satuan pendidikan sangat terpengaruh oleh situasi Covid-19 yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, guru, siswa, dan pemangku kepentingan lain di dunia pendidikan perlu bersikap fleksibel dan perlu mempersiapkan jenis proses pembelajaran apapun, baik itu, PTM, PJJ, maupun pembelajaran campuran.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, penelitian ini juga mengambil contoh di Kabupaten Magelang dan Sragen dalam analisis terkait praktik beragam proses pembelajaran tersebut di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara pada lima siswa dan satu guru di Kabupaten Magelang dan Sragen, masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran di awal tahun ketiga pandemi ini. Baik itu pada PJJ, PTM, maupun pembelajaran campuran.

Dari kelima siswa yang melakukan wawancara, semuanya mengaku bahwa penjelasan dari guru lebih mudah diterima ketika PTM dibanding saat PJJ. Saat PJJ, guru biasanya hanya memberikan penjelasan melalui video dari platform YouTube. Bahkan, saat PJJ terdapat guru yang tidak memberi penjelasan materi, namun langsung memberi tugas pada siswa. Hal tersebut membuat siswa kurang memahami materi pelajaran saat PJJ. Berikut keterangan beberapa siswa yang menjadi informan mengenai hal tersebut:

“..pas PTM gurune le njelaske luweh mantep, dadi rodo dong (saat PTM penjelasan dari guru lebih mantap, jadi agak lebih paham..” (MH, siswa SMK di Magelang, 23 Mei 2022).

“..*jelasinnya* kadang lewat video di *share* di grup/Google classroom, kadang *share link* pembahasan dari YouTube, ada juga yang *ga jelasin ujuk ujuk* (tiba-tiba) *ngasih* tugas..” (ZH, siswa SMA di Sragen, 13 Juni 2022).

“..kalau aku pribadi, di sekolahku *kan* jarang ada Zoom meeting *gitu to*, jadi kalau mau tanya yang belum dipahami harus *japri* (pesan pribadi) gurunya, itu kadang juga *ga dibales*..” (ZH, siswa SMA di Sragen, 13 Juni 2022).

Bukan hanya siswa saja yang lebih memilih PTM, namun guru juga. Berdasarkan penuturan dari salah satu guru yang menjadi informan dalam studi ini, sejauh ini banyak kendala yang ditemukan saat PJJ, sebab saat PJJ guru tidak dapat memantau kegiatan siswa secara langsung. Sementara, saat PTM, interaksi secara langsung antara guru dengan siswa dapat terjalin. Hal tersebut membuat proses penjelasan materi dan penerimaan materi menjadi lebih mudah. Selain itu, PJJ juga membuat guru dan siswa merasa jenuh, sehingga ada siswa yang mengabaikan tugas dari guru. Berikut pernyataan salah satu guru MAN (Madrasah Aliyah Negeri) di Sragen yang menjadi informan mengenai hal tersebut:

“..kalau kendala lebih ke PJJ ya, Mbak. Kalau PJJ itu guru tidak bisa memantau murid, kalau PTM *kan* muridnya *ngapain ya* guru tau. Kalau PJJ juga *nggak* ada interaksi langsung. Kalau interaksinya langsung *kan* enak *njelasinnya*. Waktu PJJ juga banyak murid yang jenuh. Guru *aja* jenuh apalagi murid ya, Mbak. Tugas-tugas dari guru jadi *nggak* dikerjakan dan guru *ndak* bisa *ngoyak-ojak* (mengejar-ngejar). Kalau PTM *kan* bisa ditunggu, diminta menyelesaikan saat itu juga *yo* (juga) bisa..” (SP, guru MAN di Sragen, 15 Juni 2022).

Pernyataan beberapa informan di atas menunjukkan bahwa informan dalam studi ini masih menganggap bahwa PTM lebih efektif dibanding PJJ karena beberapa alasan yang telah disebutkan di atas. Kondisi yang hampir sama juga dirasakan oleh siswa di Kota Bekasi. Hasil studi Hotijah (2022) menunjukkan bahwa saat PJJ, siswa dari jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) mengaku kesulitan dalam memahami mata pelajaran Fisika saat dijelaskan secara *online*. Sementara siswa dari jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) mengaku paham pada materi yang dijelaskan oleh guru, meskipun pemahaman mereka tidak sebaik saat PTM. Selain itu, informan dalam studi Hotijah juga menyatakan beberapa kendala lain saat PJJ, diantaranya adalah masalah koneksi dan kuota internet yang kurang mendukung.

Sikap siswa dan guru yang menganggap bahwa PTM lebih efektif dapat disebabkan karena kurangnya perencanaan yang matang dan baik saat PJJ, sehingga banyak siswa yang merasa

jenuh dan tidak memahami pelajaran. Menurut Evitasari & Utamaningtyas (2021), perencanaan yang matang dan baik mampu mendorong kegiatan pembelajaran berlangsung lancar, terstruktur dan terarah karena seluruh elemen pembelajaran dirumuskan dan digambarkan dengan baik.

Kemungkinan lain penyebab masih banyaknya kendala saat PJJ adalah pelaku pendidikan di Indonesia masih belum terbiasa dengan teknologi. Kebanyakan siswa dan guru di Indonesia baru melakukan PJJ saat pandemi Covid-19, yakni di awal tahun 2020. Informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa di awal tahun ketiga pandemi ini, mereka sudah lebih terbiasa dalam menggunakan teknologi untuk melakukan pembelajaran. Walaupun begitu, mereka juga tidak menampik masih adanya kendala yang dihadapi. Berikut pernyataan salah satu siswa SMK di Magelang yang menjadi informan mengenai hal tersebut:

“..nek sakniki nggih tasih onten kendala ngagem google meet, ribet. Kancane kula nggih tasih onten sing kangelan (kalau sekarang ya masih ada kendala pakai Google Meet, ribet. Temanku juga masih ada yang kesulitan)..” (MH, siswa SMK di Magelang, 23 Mei 2022).

Terkait dengan kendala penggunaan teknologi, menurut Kokemuller (n.d.), siswa yang memiliki hambatan dengan teknologi akan membutuhkan interaksi yang teratur dengan guru dan teman-teman mereka. Saat PJJ berlangsung, mereka juga harus lebih berjuang untuk menggunakan berbagai platform belajar daring, padahal sebenarnya platform-platform tersebut juga masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, banyak siswa dan guru yang masih lebih memilih PTM dibanding PJJ.

Temuan lain berdasar hasil wawancara dalam studi ini adalah beberapa informan mengatakan bahwa mereka lebih senang melakukan PTM karena adanya interaksi sosial dengan teman-teman mereka. Fakta tersebut menunjukkan bahwa di tengah berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh PJJ, tetap ada aspek sosial yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Sesuai dengan pernyataan Kokemuller (n.d) yang menyatakan bahwa *online education* memiliki kelemahan, seperti kurangnya kontak secara langsung. Hal tersebut berdampak negatif pada kemampuan siswa untuk berinteraksi, baik itu dengan guru maupun teman sebaya. Tidak adanya kontak langsung juga dapat menghilangkan beberapa aspek sosial, seperti interaksi sosial yang terjadi secara informal di satuan pendidikan. Berikut pernyataan beberapa siswa di Magelang dan Sragen mengenai hal tersebut:

“..*pas* dulu awal-awal masuk sekolah *sebenere* lebih pilih *online soale* (soalnya) belum punya kenalan, tapi sekarang udah terbiasa sekolah *terus* udah punya *temen* banyak jadi suka tatap muka..” (ZH, siswa SMA di Sragen, 13 Juni 2022).

“..aku *milih* PTM karena di sana bisa *bareng-bareng* belajarnya. Gurune *le njelaske* juga lebih jelas..” (KN, siswa SD di Magelang, 23 Mei 2022).

“..lebih suka di *sekolahan* karena *temen-temennya* tingkahnya lucu. Soalnya diajari guru juga, kalau di rumah diajari ibu, kalau aku salah ibu *sok* (sering) marah-marah, galak..” (HK, siswa SD di Magelang, 23 Mei 2022).

Efek negatif lain dari adanya PJJ adalah adanya risiko putus sekolah yang lebih tinggi. Sebuah studi yang dipublikasikan oleh Columbia University Community College Research Center pada bulan Juli 2011 menunjukkan bahwa mahasiswa perguruan tinggi di Washington lebih mungkin untuk meninggalkan kelas *online* daripada kelas tradisional. Kondisi tersebut sesuai dengan keterangan salah satu guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Sragen yang membenarkan adanya kasus putus sekolah di sekolahnya yang terjadi saat PJJ.

“..ada satu anak yang putus sekolah, karena murid itu jenuh dan tidak siap mental. Guru saja jenuh, apa lagi murid. Makanya dia *nggak* mau lagi..” (SP, guru MAN di Kabupaten Sragen, 15 Juni 2022).

Implementasi SKB 4 Menteri

SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 pertama ditetapkan pada 30 Maret 2021. Hingga pertengahan bulan Juni 2022, SKB tersebut telah mengalami penyesuaian sebanyak enam kali, tergantung pada kondisi pandemi Covid-19 yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut menunjukkan betapa keberlangsungan proses pembelajaran di satuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh situasi pandemi yang kondisinya masih jauh dari kepastian.

Jika melihat penyesuaian keenam SKB 4 Menteri tersebut, dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran pada poin satu, disebutkan bahwa satuan pendidikan dapat menyelenggarakan PTM setiap hari dengan jumlah peserta didik 100 persen dari kapasitas ruang kelas, dan jam pembelajaran sesuai dengan kurikulum jika satuan pendidikan tersebut berada pada level 1, 2, dan 3, dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80

persen dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di atas 60 persen di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan penuturan salah satu informan yang merupakan guru di MAN 2 Sragen, satuan pendidikan tempatnya mengajar telah melaksanakan PTM setiap hari dengan jumlah jam pembelajaran hampir sama dengan kurikulum. Langkah tersebut dilakukan karena 100 persen guru dan tenaga kependidikan di sana telah melakukan vaksinasi Covid-19 ketiga, sementara 100 persen siswa di sana telah melakukan vaksinasi Covid-19 kedua.

Jika melihat angka vaksinasi Covid-19 di Indonesia, data dari vaksin.kemkes.go.id (15/06/2022) menunjukkan bahwa 96,51 persen dari total target sasaran masyarakat telah melakukan vaksinasi dosis pertama, 80,79 persen masyarakat telah melakukan vaksinasi dosis kedua, dan 23,18 persen masyarakat telah melakukan vaksinasi dosis ketiga. Walaupun pencapaian vaksinasi di Indonesia semakin membaik, namun hal tersebut sebaiknya tidak menjadi alasan bagi masyarakat, termasuk pelaku pendidikan untuk mengabaikan protokol kesehatan.

Studi yang dilakukan oleh Lanzavecchia et al., (2021) di Chile menunjukkan bahwa tidak ada intervensi tunggal yang 100 persen efektif menangani Covid-19. Hanya kombinasi dari beberapa intervensi yang dapat melindungi masyarakat dari penularan dan penyebaran virus tersebut. Maka dari itu, walaupun jumlah vaksinasi penduduk di Indonesia kian membaik, namun penerapan protokol kesehatan juga masih perlu ditegakkan. Apalagi saat ini status Covid-19 sebagai pandemi di Indonesia masih belum dihapuskan.

Dalam SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 disebutkan bahwa PTM di dalam maupun di luar lingkungan satuan pendidikan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan diantaranya yakni menutup masker sesuai dengan ketentuan, yaitu menutup hidung, mulut, dan dagu; menerapkan jaga jarak antar orang dan/atau antar-kursi/meja; menghindari kontak fisik, dan lain-lain.

Namun, informan dalam studi ini menyatakan bahwa saat ini penerapan protokol kesehatan tidak dilakukan dengan ketat. Menurut mereka, kini satuan pendidikan sudah tidak mewajibkan penggunaan masker dan menerapkan *social distancing*. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan mandat yang tertuang dalam SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Berikut pernyataan beberapa informan mengenai hal tersebut:

“..kalau sekarang sudah tidak wajib pakai masker dan cuci tangan. Penataan meja di ruang kelas juga tidak diberi jarak..” (MH, siswa SMK di Kabupaten Magelang, 23 Mei 2022).

“..sekarang sudah *nggak* wajib menerapkan prokes, murid di sekolah juga *udah* banyak yang buka masker..” (ZH, siswa SMA di Kabupaten Sragen, 13 Juni 2022).

“..penerapan prokes masih tapi tidak seketat seperti waktu pertama mulai PTM, Mbak. Sudah banyak yang buka masker juga. Tapi kalau murid-murid jajan di kantin biasanya pada dibungkus terus dimakan di kelas..” (SP, guru MAN di Kabupaten Sragen, 15 Juni 2022).

Pernyataan beberapa informan di atas menunjukkan bahwa di satuan pendidikan mereka, protokol kesehatan sudah tidak lagi diterapkan dengan ketat. Bukan hanya di Kabupaten Magelang dan Sragen saja, namun satuan pendidikan di daerah lain juga banyak yang melanggar aturan mengenai penerapan protokol kesehatan. Kepala Bidang Advokasi P2G Imam Zanatul Haeri menyatakan bahwa sejak PTM 100 persen dimulai beberapa bulan lalu, prokes banyak dilanggar oleh warga sekolah. Siswa dan guru semakin tidak disiplin protokol kesehatan (padek.jawapos.com, 12/05/2022). Padahal, untuk menghindari Covid-19, vaksinasi saja tidak cukup. Penerapan protokol kesehatan yang tepat juga masih dibutuhkan. Apalagi baru-baru ini muncul kasus hepatitis akut yang banyak menyerang anak-anak dan juga varian baru Covid-19, yakni Omicron subvarian BA.4 dan BA.5 yang telah terdeteksi di Indonesia.

Lengahnya penerapan protokol kesehatan menunjukkan bahwa aturan yang tertuang dalam SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 belum diimplementasikan dengan baik. Studi yang dilakukan oleh Nursuci (2022) menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan SKB 4 Menteri di lokasi studinya, yakni kurangnya komunikasi, kurangnya kesadaran warga sekolah, dan kurangnya kerjasama warga sekolah. Kendala implementasi SKB tersebut juga tercermin dalam studi ini. Informan yang merupakan guru MAN di Sragen menyatakan bahwa kebanyakan guru di satuan pendidikannya hanya mengetahui gambaran utama dari aturan tersebut. Informan mengaku tidak mengetahui aturan tersebut secara menyeluruh. Ia juga menyatakan bahwa pernah ada sosialisasi terkait SKB tersebut, namun hanya diperuntukkan bagi pihak-pihak tertentu saja, misalnya wakil kepala sekolah. Berikut pernyataan informan tersebut:

“..ya *tau* tapi *cuman* inti-intinya *aja* Mbak, *nggak tau* keseluruhannya. Pernah ada sosialisasi tapi hanya pihak-pihak tertentu saja yang ikut, *kayak* wakil kepala sekolah. Kalau guru-guru biasa *nggak* ikut..” SP, guru MAN di Kabupaten Sragen, 15 Juni 2022).

“..kalau dukungan (untuk implementasi SKB) dari Kemenag atau Pemda saya kurang tahu ya, Mba. Sepertinya wk sarpras (wali kepala sekolah bidang sarana prasarana) yang *tau* itu. *Cuman* setahu saya semua biaya penerapan prokes dari sekolah, *nggak tau* diambil dari uang BOS atau apa..” SP, guru MAN di Kabupaten Sragen, 15 Juni 2022).

Pernyataan informan di atas menunjukkan kurangnya komunikasi antara guru dengan pemimpin satuan pendidikan, dalam hal ini adalah wakil kepala sekolah, yang menyebabkan guru tidak menangkap informasi secara keseluruhan dari SKB 4 Menteri. Menurut Peter (dalam Tangkilisan, 2003), kurangnya informasi dapat berakibat pada gambaran-gambaran yang kurang tepat mengenai isi kebijakan yang sesungguhnya. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab kegagalan implementasi.

Selain kurangnya informasi, tidak cukupnya dukungan dari pemerintah, minimnya kesadaran warga sekolah, dan kurangnya kerja sama juga menjadi salah satu penghambat penerapan implementasi aturan tersebut. Pernyataan informan terkait langkahnya penerapan protokol kesehatan di kalangan guru dan siswa menunjukkan minimnya kesadaran dari semua pihak. Sementara ketidaktahuan guru mengenai aturan secara menyeluruh dan juga mengenai upaya pengimplementasiannya menunjukkan kurangnya kerja sama antara pimpinan sekolah dengan guru, yang dapat menghambat keberhasilan implementasi aturan tersebut.

Penutup dan Rekomendasi

Penutup

Berdasar analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa di awal hingga pertengahan tahun ketiga pandemi ini, siswa dan guru di beberapa daerah di Indonesia lebih memilih untuk melakukan PTM dibanding PJJ. Menurut siswa yang menjadi informan dalam penelitian ini, penjelasan dari guru saat PTM lebih mudah dipahami. Saat PTM juga memungkinkan adanya interaksi sosial secara langsung dengan teman sebaya yang tidak terjalin saat PJJ. Selain siswa, guru juga lebih memilih untuk PTM, sebab interaksi secara langsung memudahkan guru untuk

mengontrol kegiatan siswa. Saat PTM guru juga mengaku lebih mudah dalam memberikan penjelasan kepada siswa. Selain itu, PJJ juga membuat anak dan guru merasa jenuh, bahkan ada siswa yang putus sekolah akibat kejenuhan yang dialami saat PJJ.

Angka vaksinasi yang tinggi membuat hampir seratus persen sekolah di Indonesia sudah melakukan PTM. Ada yang melakukan PTM secara penuh, ada juga yang masih melakukan PTM terbatas. Namun walaupun angka vaksinasi sudah tinggi, seharusnya siswa, guru, tenaga kependidikan, dan pelaku pendidikan lainnya tetap beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebab, vaksinasi saja tidak cukup untuk menangkal Covid-19. Apalagi saat ini muncul kasus hepatitis akut dan varian baru Covid-19.

Lengahnya penerapan protokol kesehatan menunjukkan bahwa aturan yang tertuang dalam SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 belum diimplementasikan dengan baik. Beberapa kendala yang menghambat keberhasilan implementasi SKB tersebut diantaranya kurangnya komunikasi dan kerja sama antar penyelenggara pendidikan, serta kurangnya kesediaan warga satuan pendidikan untuk mengimplementasikan aturan tersebut.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan di sektor pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai proses pembelajaran dan juga implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 diantaranya:

Pertama, Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu merumuskan visi misi pendidikan Indonesia pada aspek teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Dalam draf terakhir RUU tersebut belum dirumuskan visi dan misi tersebut. Padahal, pandemi jelas menunjukkan adanya ketimpangan dalam penggunaan dan akses terhadap teknologi di Indonesia. Sementara dewasa ini, teknologi bukan sesuatu yang dapat dihindari.

Kedua, Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan sektor privat yang bergerak di dunia pendidikan perlu mendesain sistem pembelajaran campuran yang terstruktur, terarah, dan menarik. Kondisi pandemi yang masih jauh dari kepastian mengharuskan pelaku pendidikan termasuk guru dan tenaga pendidikan untuk dapat bersikap fleksibel. Tidak ada jaminan bahwa PTM atau PTM terbatas yang sedang berjalan saat ini tidak akan terhenti. Jika situasi Covid-

19 kembali memburuk, maka opsi pembelajarn yang terbaik adalah pembelajaran campuran. Metode pembelajaran tersebut menggabungkan kelebihan yang ada pada PTM dan PJJ. Studi juga menunjukkan bahwa pembelajaran campuran memiliki potensi untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

Ketiga, Kemendikbudristek, Kemeterian Agama, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sektor privat, dan pemangku kepentingan lain terkait perlu melakukan pemugaran terhadap LPTK dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Banyak studi yang menunjukkan bahwa belum maksimalnya kualitas LPTK dan PPG membuat guru menjadi tidak maksimal dalam memberikan materi pelajaran pada siswa. Kondisi tersebut tentu berpengaruh pada hasil belajar siswa. LPTK dan PPG yang berkualitas akan menghasilkan guru-guru yang berkualitas pula. Dengan begitu, apapun jenis pembelajarannya, baik itu PTM. PJJ, maupun pembelajaran campuran, guru akan tetap mampu mengajar dengan maksimal.

Keempat, Kemendikbudristek dan Kementerian Agama dengan dibantu oleh dinas terkait perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Semua informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa saat ini aktivitas di satuan pendidikan sudah tidak terlalu memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Padahal, penerapan protokol kesehatan banyak di atur dalam SKB tersebut. Pemerintah juga belum mengizinkan pembukaan masker di ruang kelas.

Kelima, untuk memaksimalkan keberhasilan implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Kemendikbudristek, Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan dinas terkait perlu memberikan dukungan bagi satuan pendidikan. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan finansial atau sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan. Selain itu, pimpinan satuan pendidikan juga perlu meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan semua warga sekolah, termasuk guru dan tenaga kependidikan untuk mendorong keberhasilan implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Belloni, M. L. (1999). *Educação a Distância*. Campinas-SP: Autores Associados.
- Costa, R. D., Souza, G. F., Valentim, R. A., & Castro, T. B. (2020). The Theory of Learning Styles Applied to Distance Learning. *Cognitive Systems Research*, 64, 134-145.
- Evitasari, A., & Utamaningtyas, S. (2021). Pendampingan Penyusunan RPP "Satu Halaman" bagi Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-14.
- Hotijah, S. (2022). Persepsi Siswa Kelas X SMA terhadap Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 8928-8933.
- Lanzavecchia, Beyer, S., Johanna, K., & Sophie, E. (2021). Vaccination Is Not Enough: Understanding the Increase in Cases of COVID-19 in Chile despite a High Vaccination Rate. *Epidemiologia*, 2(3), 377-390.
- Moore, M. G., & Kearsley, G. (2011). *Distance Education: A Systems view of online learning (3rd ed.)*. Belmont-US: Wadsworth Cengage Learning.
- Mufiz, A. (1999). *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Universitas Terbuka Depdikbud.
- Nursuci, L. (2022). *Implementasi SKB 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 (Studi di SMA Negeri 1 Brang Rea)*. Mataram: Universitas Mataram.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik.
- Van Meter, D., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process*. Beverly Hill: Sage Publication.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir*, 129-153.

Internet

- Antara. (2022, April 4). *Pembelajaran Tatap Muka dengan Kapasitas 100 Persen di Bekasi*. Diakses pada April 4, 2022, dari Antara: <https://www.antaraneews.com/foto/2800089/pembelajaran-tatap-muka-dengan-kapasitas-100-persen-di-bekasi>

- AntaraJateng. (2022, April 5). *Banyumas Izinkan Sekolah Gelar PTM 100 Persen*. Diakses pada April 6, 2022, dari [jateng.antaranews.com](https://jateng.antaranews.com/berita/442153/banyumas-izinkan-sekolah-gelar-ptm-100-persen):
- CNN Indonesia. (2022, Maret 16). *Komisi Pendidikan DPR Akan Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka*. Diakses pada April 6, 2022, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220316165633-32-772182/komisi-pendidikan-dpr-akan-evaluasi-pembelajaran-tatap-muka>
- CNN Indonesia. (2022, April 6). *PTM 100 Persen Jakarta: 10.979 Sekolah Belajar Tatap Muka*. Diakses pada April 6, 2022, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220406081104-20-780905/ptm-100-persen-jakarta-10979-sekolah-belajar-tatap-muka>
- Covid19.go.id. (2022, Juni 14). *Situasi COVID-19 di Indonesia (Update per 14 Juni 2022)*. Diakses pada 15 Juni 2022, dari Covid19.go.id: <https://covid19.go.id/artikel/2022/06/14/situasi-covid-19-di-indonesia-update-14-juni-2022>
- detik.com. (2022, Februari 20). *11 Sekolah di Parepare Jadi Klaster COVID-19, Disdik Waswas Lanjutkan PTM*. Diakses pada 6 April 2022, dari detik.com: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-5950680/11-sekolah-di-parepare-jadi-klaster-covid-19-disdik-waswas-lanjutkan-ptm>
- Fimela. (2022, April 5). *PTM 100 Persen di Jakarta Siap Diberlakukan, KPAI Temukan Masih Ada Sekolah yang Kesulitan Jaga Jarak*. Diakses pada 6 April 2022, dari Fimela.com: <https://www.fimela.com/info/read/4930361/ptm-100-persen-di-jakarta-siap-diberlakukan-kpai-temukan-masih-ada-sekolah-yang-kesulitan-jaga-jarak>
- Jatengprov. (2021, September 29). *UNICEF Apresiasi Pelaksanaan PTM Di Jateng*. Diakses pada 6 April 2022, dari [Jatengprov.go.id](https://jatengprov.go.id): <https://jatengprov.go.id/publik/unicef-apresiasi-pelaksanaan-ptm-di-jateng/>
- Kemendikbud RI. (2022, Juni 14). *Webinar Pemulihan Layanan Pendidikan Dampak Pandemi COVID-19*. Diakses pada 15 Juni 2022, dari Kemendikbud RI: <https://www.youtube.com/watch?v=BDKnxvJNhnU>
- Kokemuller, N. (n.d.). *What Are the Positive & Negatives With Online Learning?* Diakses pada 6 April 2022, dari [Seattlepi.com](https://education.seattlepi.com): <https://education.seattlepi.com/positive-negatives-online-learning-1138.html>
- Kompas Tv. (2022, April 6). *Kasus Covid Menurun, Siswa Di Kabupaten Jembrana Mulai Ikuti PTM*. Diakses pada 6 April 2022, dari Kompas Tv: <https://www.kompas.tv/article/277280/kasus-covid-menurun-siswa-di-kabupaten-jembrana-mulai-ikuti-ptm>
- liputan6.com. (2022, April 5). *Disdikbud Jateng: PTM Lancar, Tetap Wajib Prokes*. Diakses pada 6 April 2022, dari Liputan6: <https://jateng.liputan6.com/read/4929628/disdikbud-jateng-ptm-lancar-tetap-wajib-prokes>

- padek.jawapos.com. (2022, Mei 12). *Pelanggaran Prokes di Sekolah Masih Marak*. Diakses pada 16 Juni 2022, dari padek.jawapos.com:
<https://padek.jawapos.com/nasional/12/05/2022/pelanggaran-prokes-di-sekolah-masih-marak/>
- republika.co.id. (2022, Februari 3). *Ditemukan Klaster Sekolah, Banyumas Kembali Berlakukan PTM 50 Persen*. Diakses pada 6 April 2022, dari republika.co.id:
<https://republika.co.id/berita/r6pp6f291/ditemukan-klaster-sekolah-banyumas-kembali-berlakukan-ptm-50-persen>
- Republika.id. (2022, April 4). *Bali Kembali Terapkan Pembelajaran Tatap Muka*. Diakses pada 6 April 2022, dari Republika.id:
<https://www.republika.co.id/berita/r9tl42314/bali-kembali-terapkan-pembelajaran-tatap-muka>
- Sindonews.com. (2022, April 4). *Hari Ini, Kota Tangerang Berlakukan Pembelajaran Tatap Muka 100%*. Diakses pada 6 April 2022, dari Sindonews.com:
<https://metro.sindonews.com/read/732627/171/hari-ini-kota-tangerang-berlakukan-pembelajaran-tatap-muka-100-1649034274>
- vaksin.kemkes.go.id. (2022, Juni 15). *Vaksinasi COVID-19 Nasional*. Diakses pada 15 Juni 2022, dari vaksin.kemkes.go.id: <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>

Profil Penulis



Nisaaul Muthiah – Peneliti Bidang Sosial

Nisaaul Muthiah (Nisa) adalah alumni Departemen Sosiologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lulus dari jurusannya pada 2018. Sebelum menjadi peneliti bidang sosial di The Indonesian Institute, Nisa juga sempat bekerja sebagai asisten peneliti di beberapa lembaga.

Nisa pernah melakukan penelitian bertemakan kognisi anak yang berjudul “Asosiasi antara Karakteristik Anak, Status Sosial Ekonomi Keluarga dan Kognisi Anak di Indonesia: Analisis Data Sekunder Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI-5)”. Fokus kajian Nisa adalah soal pendidikan, kemiskinan, kesehatan publik, gender, dan budaya.

Email: nisaaul@theindonesianinstitute.com

Profil Lembaga



The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (*Wacana*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia* dalam bahasa Indonesia dan *The Indonesian Update*, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum, Policy Talks, dan Initiative!*).

Jl. HOS Cokroaminoto No. 92
Menteng – Jakarta Pusat 10310
021-315 8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com